

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DI SEKTOR PENDIDIKAN TERHADAP KUALITAS PENDIDIKAN

Zalfa' Rona Aulia¹, Rezza Fanessa Yulianti Larotje², Eva Hany Fanida³, Melda
Fadiyah Hidayat⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Surabaya

Email : zalfaronaaulia@gmail.com¹, fanessayulianti@gmail.com²,
evafanida@unesa.ac.id³, meldahidayat@unesa.ac.id⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan data sekunder dari BPS, Kementerian Keuangan, serta OECD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran pendidikan di Indonesia terus meningkat dan memberikan dampak positif terhadap akses pendidikan, bantuan pendidikan, serta peningkatan rata-rata lama sekolah. Namun, peningkatan anggaran belum sepenuhnya meningkatkan kualitas pendidikan secara optimal karena masih terdapat ketimpangan pendidikan dan rendahnya capaian literasi serta numerasi siswa Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Kualitas Pendidikan.

Abstract

This study aims to analyze the effect of government expenditure in the education sector on the quality of education in Indonesia. The research method uses a qualitative approach through literature study and secondary data from Statistics Indonesia (BPS), the Ministry of Finance, and OECD. The results show that the education budget in Indonesia continues to increase and has a positive impact on access to education, educational assistance programs, and the average years of schooling. However, the increase in the education budget has not fully improved the quality of education optimally due to educational inequality and the low literacy and numeracy achievement of Indonesian students. Therefore, more effective and targeted management of the education budget is needed to improve the quality of national education.

Keywords: *Government Expenditure, Education, Quality Of Education.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional karena berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam kajian

pembangunan ekonomi, pendidikan dipandang sebagai bentuk investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong

economic growth that is sustainable. Education is also considered as an important factor in increasing the quality of individuals and the competitiveness of a country (Todaro & Smith, 2015). Because of that, the government has a strategic role in ensuring the availability of education services that are fair and of quality through education expenditure policies in the education sector.

In Indonesia, the government's commitment to education is realized through the mandate of the 1945 Basic Law that requires a minimum of 20% of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) for education. In 2026, the government allocates an education budget of Rp769,09 trillion, an increase from Rp724,3 trillion in 2025. This allocation makes the 2026 education budget one of the largest in the history of Indonesia.

The budget is allocated through central government spending of Rp470,46 trillion, transfer to provinces of Rp264,62 trillion, and financing of Rp34 trillion. The funds are used to support various education programs such as the Smart Indonesia Program (PIP), Smart Indonesia Card (KIP) Scholarship, construction of facilities and infrastructure, improvement of teacher quality and

lecturers, and operational assistance for other education.

Although education spending continues to increase every year, the increase in nominal budget is not automatically increasing the quality of education. This is evident from the various challenges in education in Indonesia, such as quality gaps between provinces, limited facilities in underdeveloped areas, and literacy and numeracy skills of students that still need to be improved. With this, the effectiveness of government spending has become an important issue, because the quality of education is not only affected by the size of the budget, but also by distribution, management, and accuracy of budget use.

Based on these conditions, research on the impact of government spending on education quality is relevant to be carried out. This analysis is important to know whether the increase in government spending really gives a positive impact on education quality or just faces obstacles in implementation. The results of the research are expected to become evaluation material for the government in formulating

kebijakan pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

KAJIAN TEORI

1. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah merupakan seluruh belanja yang dilakukan negara untuk membiayai kebutuhan publik dan menjalankan fungsi pemerintahan. Menurut Richard Musgrave, pengeluaran pemerintah memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa publik, termasuk pendidikan, yang tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh mekanisme pasar.

Dalam konteks pendidikan, pengeluaran pemerintah menjadi bentuk investasi publik yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta mendukung berbagai program bantuan pendidikan. Semakin besar alokasi anggaran pendidikan yang dikelola secara efektif, maka semakin besar pula peluang peningkatan kualitas pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4), pemerintah

Indonesia wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN maupun APBD. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan dipandang sebagai sektor prioritas dalam pembangunan nasional.

2. Konsep Kualitas Pendidikan

Kualitas pendidikan merupakan tingkat keberhasilan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan menghasilkan lulusan yang kompeten. Di Indonesia, kualitas pendidikan sering diukur melalui beberapa indikator seperti:

- Angka partisipasi sekolah
- Rata-rata lama sekolah
- Tingkat kelulusan
- Hasil asesmen nasional
- Serta kemampuan literasi dan numerasi peserta didik

Kualitas pendidikan yang baik menunjukkan bahwa sistem pendidikan mampu memberikan pembelajaran yang efektif, merata, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman.

3. Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Kualitas Pendidikan

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki hubungan erat

dengan kualitas pendidikan. Alokasi anggaran yang besar memungkinkan pemerintah menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, meningkatkan kesejahteraan guru, memperluas akses bantuan pendidikan, dan mendukung inovasi pembelajaran. Namun, besarnya anggaran tidak selalu menjamin peningkatan kualitas pendidikan. Efektivitas penggunaan anggaran, transparansi pengelolaan dana, pemerataan distribusi, serta pengawasan implementasi program menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian, hubungan antara pengeluaran pemerintah dan kualitas pendidikan dapat bersifat positif apabila anggaran dikelola secara efisien dan tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel penelitian, serta data nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, OECD. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan

dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap kualitas pendidikan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, anggaran pendidikan tahun 2023 sebesar Rp612,2 triliun, meningkat menjadi Rp665 triliun pada tahun 2024, kemudian naik kembali menjadi Rp724,3 triliun pada tahun 2025 dan mencapai Rp769,09 triliun pada tahun 2026. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah terus menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Tabel Perkembangan Anggaran Pendidikan Indonesia

| Tahun | Anggaran Pendidikan | Persentase Kenaikan |
|-------|---------------------|---------------------|
| 2023 | Rp 612,2 triliun | - |
| 2024 | Rp 665 triliun | 8,6% |
| 2025 | Rp 724,3 triliun | 8,9% |
| 2026 | Rp 769,09 triliun | 6,2% |

Pada tahun 2026, anggaran pendidikan dialokasikan melalui tiga komponen utama, yaitu belanja pemerintah pusat sebesar Rp470,46

triliun, transfer ke daerah sebesar Rp264,62 triliun, dan pembiayaan pendidikan sebesar Rp34 triliun. Alokasi terbesar diberikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) sebesar Rp223,56 triliun atau sekitar 29% dari total anggaran pendidikan nasional. Selain itu, anggaran juga dialokasikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar Rp56,68 triliun serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sebesar Rp61,87 triliun.

Tabel Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2026

| Komponen Anggaran | Jumlah |
|---------------------------|-------------------|
| Belanja Pemerintah Pusat | Rp 470,46 triliun |
| Transfer ke Daerah | Rp 264,62 triliun |
| Pembiayaan Pendidikan | Rp 34 triliun |
| Total Anggaran Pendidikan | 769,09 triliun |

Besarnya pengeluaran pemerintah tersebut memberikan dampak positif terhadap akses pendidikan masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya rata-rata lama sekolah (RLS) masyarakat Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Rata-rata lama sekolah Indonesia mengalami peningkatan dari sekitar 8,69 tahun pada tahun 2020 menjadi sekitar 9,22 tahun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin mampu menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah pertama dan menengah atas.

Tabel Rata-Rata Lama Sekolah di Indonesia

| Tahun | Rata-Rata Lama Sekolah |
|-------|------------------------|
| 2020 | 8,69 tahun |
| 2021 | 8,76 tahun |
| 2022 | 8,85 tahun |
| 2023 | 8,98 tahun |
| 2024 | 9,22 tahun |

Peningkatan pengeluaran pemerintah juga berdampak terhadap perluasan program bantuan pendidikan. Pada tahun 2025, Program Indonesia Pintar (PIP) diberikan kepada sekitar 20,4 juta siswa dan KIP Kuliah diberikan kepada sekitar 1,1 juta mahasiswa. Program tersebut membantu masyarakat kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan. Dengan adanya bantuan pendidikan, angka partisipasi sekolah di berbagai daerah mengalami peningkatan dan risiko putus sekolah dapat ditekan.

Namun demikian, peningkatan anggaran pendidikan belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas pendidikan secara optimal. Berdasarkan hasil PISA 2022 yang dirilis OECD, kemampuan literasi, numerasi, dan sains siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Skor matematika Indonesia tercatat sekitar 366 poin, skor membaca sekitar 359 poin, dan skor sains sekitar 383 poin. Angka tersebut masih

berada di bawah rata-rata OECD yang berada di kisaran 470 poin.

Tabel Hasil PISA Indonesia Tahun 2022

| Bidang | Skor | Rata-Rata OECD |
|------------|------|----------------|
| Matematika | 366 | 472 |
| Membaca | 359 | 476 |
| Sains | 383 | |

Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pembelajaran secara signifikan. Salah satu penyebabnya adalah masih adanya ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah. Sekolah di daerah perkotaan cenderung memiliki fasilitas, akses internet, dan tenaga pendidik yang lebih baik dibandingkan sekolah di daerah terpencil. Selain itu, sebagian besar anggaran pendidikan masih digunakan untuk belanja operasional dan administrasi sehingga peningkatan kualitas pembelajaran belum maksimal.

Permasalahan efektivitas anggaran pendidikan juga menjadi perhatian masyarakat. Beberapa pihak menilai bahwa sebagian anggaran pendidikan belum sepenuhnya fokus pada peningkatan mutu pembelajaran karena adanya pengalihan anggaran untuk program lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran

pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan akses pendidikan, bantuan pendidikan, dan pembangunan fasilitas pendidikan. Akan tetapi, peningkatan kualitas pendidikan nasional masih menghadapi berbagai kendala seperti ketimpangan fasilitas pendidikan, efektivitas pengelolaan anggaran, dan rendahnya capaian literasi serta numerasi siswa. Oleh karena itu, pemerintah tidak hanya perlu meningkatkan jumlah anggaran pendidikan, tetapi juga memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan akses dan layanan pendidikan di Indonesia. Hal ini terlihat dari peningkatan anggaran pendidikan nasional yang terus mengalami kenaikan, yaitu dari Rp612,2 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp769,09 triliun pada tahun 2026. Peningkatan anggaran tersebut berdampak pada perluasan program bantuan pendidikan seperti Program

Indonesia Pintar (PIP) dan KIP Kuliah, pembangunan sarana pendidikan, serta peningkatan rata-rata lama sekolah masyarakat Indonesia yang mencapai sekitar 9,22 tahun pada tahun 2024.

Meskipun demikian, peningkatan pengeluaran pemerintah belum sepenuhnya mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara optimal. Hasil PISA 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi, membaca, dan numerasi siswa Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara OECD. Selain itu, masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, terutama pada daerah terpencil yang memiliki keterbatasan fasilitas pendidikan dan tenaga pendidik.

Dengan demikian, besarnya pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan belum cukup apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang efektif, pemerataan distribusi pendidikan, serta peningkatan mutu pembelajaran. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga digunakan secara tepat sasaran agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Margaretha, E., & Simanjuntak, R. A. (2020). Dampak Belanja Sektor Pendidikan terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Info Artha*, 4(2), 155–166.
- Meydiasari, D. A., & Soejoto, A. (2017). Analisis Pengaruh Distribusi Pendapatan, Tingkat Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Terhadap IPM Di Indonesia. *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan*, 1(2), 116–126.
- Arifin, Z. (2020). Analisis Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 8(1), 33–41.
- Mulyani, S. (2023). Kebijakan Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah pada Sektor Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 15–28.
- Nasution, R. (2021). Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pemerataan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 5(1), 50–61.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic*

Development (12th ed.). Pearson Education.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2023). PISA 2022 Results Volume I and II: Country Notes Indonesia. Paris: OECD Publishing.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Pendidikan Indonesia*. Jakarta: BPS.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Nota Keuangan dan APBN 2024*. Jakarta: Kemenkeu RI.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). (2024). *Laporan Kinerja Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Kemendikbudristek.